

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, S.H., M.H. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Amiruddin, et all, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- AP. Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land Reform*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Arif, M.F. “Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, (Malang: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), Hal.1-24
- Aris Prio Agus Santosa, et all, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022)
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian ilmu Hukum, (Bandung: MandarMaju, 2008)
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2009)
- Dr.Irene Eka Sihombing, SH.,CN.,MH. Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, (Jakarta, Universitas Trisakti, 2017)
- Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: Tatanusa, 2016)
- Gunanegara, Hukum Pidana Agraria, Logika Hukum Pemberian Hak atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana, (Jakarta: PT Tatanusa, 2017)

- Gunanegara, Intelijen Pertanahan Deteksi Dini Kerugian Negara Dialektika Politik Hukum Agraria, (Jakarta: Tatanusa, 2019)
- Gunanegara, Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, (Jakarta: Tatanusa, 2008)
- H.M.Arba, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Ibnu Syabri, Seri Buku Kajian Kritis Pembangunan Jalan Tol di Indonesia, Perspektif Kebijakan dalam Pembangunan Jalan Tol di Indonesia, Kerangka Alternatif Pembiayaan Jalan Tol dalam Mendukung Logistik Industri Besar dan Turunannya pada Industri Petrokimia Tuban, (Jakarta: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 2023), hal.163
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Agraria, (Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2023)
- J.J.H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya, 1999)
- Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006)
- Mudakir Iskandaryah, Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, (Jakarta: Permata Aksara, 2020)
- Muhammad Sadi Is, dkk, Hukum Agraria di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2022)
- Sarjita, Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No.34 Tahun 2003), (Yogyakarta: Tugu Jogja, 2005)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Suparman Usman, Hukum Agraria Di Indonesia Bagian Hukum Tanah, (Serang: IAIN Suhada Press, 2009)
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Perutangan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1975)
- Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2019)

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Yusriadi, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)

Jurnal

Gunanegara, “Kebijakan Negara pada Pengaturan Hak atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *researchgate.net Journal*, Vol.6, No.6, April, 2022

Gunanegara, “Pengambilalihan Hak Prioritas Bekas Pemegang Hak untuk Distribusi Tanah Obyek Reforma Agraria”, *researchgate.net Journal* July, 2022

Mukmin Zakie, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Edisi Khusus*, Vol. 18, 2011

Nurul khomariyah Syahroni dan Gunanegara “Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Kembali Sertipikat Atas Nama Pihak Ketiga Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, *Notary Journal* Vol.2, No.2 Oktober 2022

Sahnan, M. Yazid Fathoni, Musakir Salat, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol III Nomor 9, 2015

Shelin Nabila Wibowo, “Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu”, *Acta djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021

Triana Rejekiningsih, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 2, 2016

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-empat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Serang 117/Pdt.G/2018/PN Srg

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/PDT/2020/PT BTN

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 160 K/PDT/2022

Wawancara

Hasil wawancara dengan Dra.Harlina Ulwiyati selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Propinsi Banten

Hasil wawancara dengan Temmy Saputra ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan lahan jalan Tol Serang-Panimbang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jalan Bebas Hambatan Binamarga

Hasil wawancara dengan Ir. Pattiasina Jefry Recky, M.T. selaku Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Jalan Tol Lintas Jawa I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hasil wawancara dengan Dr.Ir. Kris Ade Sudiyono, M.M selaku praktisi dan pengamat Bidang Infrastruktur Publik

Lain-Lain

Maria SW. Soemardjono, kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Kompas, 2001)

Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Kompas 2001)

Parikesit, D. 2020. Peran Penting Konektivitas Jalan Tol Dalam Meningkatkan Sektor Logistik dan Perekonomian di Indonesia. <https://bpjt.pu.go.id>, Berita Umum, 4 Februari 2020

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, “Standar Operasional Prosedur Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum”, Nomor: 008/SKD/FH-UPH/VIII/2022, 18 Agustus 2022

